



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024

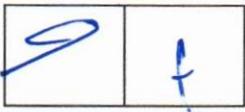
TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN GADUANG BATU DAN NAGARI
PERSIAPAN AIE TAWA DI KECAMATAN DANAU KEMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Solok dilakukan penataan Nagari untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Nagari Persiapan;
- b. bahwa adanya aspirasi dari masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar untuk mendorong dilakukan penataan Nagari untuk perkembangan dan kemajuan serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembentukan Nagari Persiapan;
- c. bahwa dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi Nagari, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Nagari, rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam perlu dilakukan Pembentukan Nagari Persiapan Gaduang Batu dan Nagari Persiapan Aie Tawa;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pembentukan Nagari Persiapan Kabupaten Solok perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Gaduang Batu dan Nagari Persiapan Aie Tawa di Kecamatan Danau Kembar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :

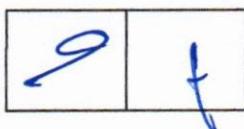
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN GADUANG BATU DAN NAGARI PERSIAPAN AIE TAWA DI KECAMATAN DANAU KEMBAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jorong adalah bagian wilayah dalam nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.
11. Nagari Induk adalah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.
12. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi nagari baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS NAGARI

Pasal 2

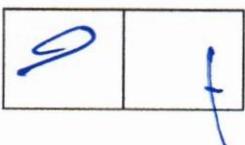
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan Gaduang Batu dan Nagari Persiapan Aie Tawa.
- (2) Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemekaran dari Nagari Induk.

Pasal 3

Pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah status dan kedudukan KAN yang sudah ada pada Nagari Induk.

Pasal 4

- (1) Nagari persiapan Gaduang Batu berasal dari sebagian wilayah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, yang terdiri dari wilayah Jorong Kampung Batu Utara, Jorong Kampung Batu Tengah, dan Jorong Kampung Batu Selatan.
- (2) Nagari Persiapan Aie Tawa berasal dari sebagian wilayah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar, yang terdiri dari wilayah Jorong Air Tawar Utara, Jorong Air Tawar Selatan, dan Jorong Aie Rarak Selatan.



Pasal 5

- (1) Nagari Induk sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.790 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa dan 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) kepala keluarga, dan setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.624 (empat ribu enam ratus dua puluh empat) jiwa dan 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) kepala keluarga.
- (2) Jumlah penduduk Nagari Persiapan terdiri atas :
 - a. penduduk Nagari Persiapan Gaduang Batu sebanyak 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) jiwa dan 1.312 (seribu tiga ratus dua belas) kepala keluarga; dan
 - b. penduduk Nagari Persiapan Aie Tawa sebanyak 4.053 (empat ribu lima puluh tiga) jiwa dan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) kepala keluarga.

Pasal 6

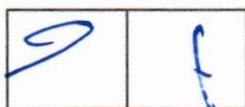
- (1) Nagari persiapan Gaduang Batu Kecamatan Danau Kembar, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Kampung Batu Dalam;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Persiapan Aia Tawa.
- (2) Nagari persiapan Aie Tawa Kecamatan Danau Kembar, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Kampuang Batu Dalam;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Persiapan Gaduang Batu; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan Gaduang Batu dan Nagari Persiapan Aie Tawa, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Nagari Persiapan dari Gubernur.
- (2) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan sampai terbentuknya Pemerintahan Nagari definitif.
- (3) Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melakukan persiapan pembentukan Nagari definitif.
- (4) Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari Persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari induk;



- c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.
- (5) Pejabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada :
- a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Wali Nagari induk.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

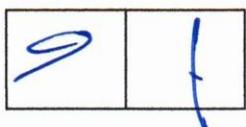
Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Nagari dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Nagari Persiapan yang telah dibentuk.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Wali Nagari Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Wali Nagari Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Nagari Persiapan.
- (3) Pejabat Wali Nagari Persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (4) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Nagari Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal

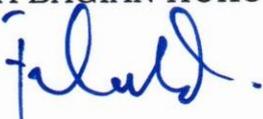
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI